

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan abad ke-21 memunculkan tantangan dan peluang bagi warga negara. Hal tersebut berdampak pada timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan tren global atau megatren di masyarakat (Kennedy, 1997). Tantangan lainnya adalah terjadinya defisit demokrasi di kalangan generasi muda yaitu kurangnya minat dan keterlibatan dalam kehidupan demokrasi. Menurut Rifki dan Nur (2018, hlm. 2-3) permasalahan diatas merupakan permasalahan multidimensional yang terjadi di Indonesia karena rendahnya kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang dimiliki oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) adalah kunci penting dalam membekali kompetensi warga negara abad ke-21 terutama dalam pembentukan masyarakat sipil (*civil society*).

Kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) merupakan komponen penting bagi generasi muda dalam kehidupan berdemokrasi dan kohesi sosial. Hal tersebut menurut Toquville (Branson, 1999) menunjukkan bahwa generasi muda adalah masyarakat baru yang harus dibekali pengetahuan, keterampilan dan karakter atau watak baik secara privat atau publik yang sesuai dengan konstitusional. Hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang terlibat aktif dan partisipatif sehingga warga negara dapat berperan dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang berdemokrasi (Galson, 2001). Permasalahan yang ditemukan oleh Soltan (2010) yang berkaitan dengan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) adalah kompetensi yang tidak merata dan tidak sama diantara warga negara yang demokratis atau dikenal dengan istilah disparitas dan *disequilibrium*. Indikator yang menyebabkan disparitas dan *disequilibrium* tersebut adalah status sosial ekonomi yang meliputi pendidikan, pekerjaan dan jumlah pendapatan (Solt, 2008).

Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menunjang kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang dimiliki oleh warga negara, oleh sebab itu pendidikan merupakan pembelajaran sepanjang hayat dan kewarganegaraan aktif. Di Indonesia pendidikan merupakan upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai realisasi dari amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-IV, oleh karena itu melalui pendidikan maka dikembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*). *European Parliament and Council* (2006, hlm. 12) menambahkan bahwa dalam pendidikan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang dikembangkan meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif. Salah satu sarana untuk memberikan pendidikan dan mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang dibutuhkan oleh generasi muda untuk menjadi warga negara yang demokratis adalah melalui persekolahan. Menurut Buchori (Al-Tabany, 2017, hlm.6) sekolah mempersiapkan siswa untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu diperlukan pengajaran terkait pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang sesuai dengan tahapan usia siswa (*National Commission on Civic Renewal*, 1998, hlm. 2).

Munculnya permasalahan yang lebih kompleks terkait fungsi sekolah yang tidak hanya diharapkan dapat mengembangkan potensi siswa (*education as development*) dan pembawa perubahan (*agent of change*), melainkan bergeser ke arah tren global atau megatren di masyarakat terkait pendidikan abad ke-21 yaitu pendidikan yang tidak hanya terbatas pada lingkup nasional melainkan mengarah secara luas ke arah pendidikan berbasis konteks global atau internasional yang memunculkan tren sekolah internasional. Menurut Walker (2015, hlm. 79) sekolah internasional merupakan organisasi yang menawarkan pendidikan internasional kepada siswanya baik melalui kurikulum dan pembelajaran yang direncanakan. Laporan ICEF (2018) terkait pertumbuhan 6% selama 5 tahun terakhir terkait sekolah internasional pada tahun 2028 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16.000 sekolah

internasional di seluruh dunia. Civinini (2019) menambahkan bahwa akan ada 7 juta siswa sekolah internasional di seluruh dunia pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pergeseran dan tren global yang menyebabkan terjadinya perubahan paradigma di masyarakat terkait sekolah internasional dalam mempersiapkan generasi muda untuk berperan sebagai bagian dari masyarakat global.

Kim dan Moberand (2019, hlm 2) berpendapat bahwa keluarga di asia memiliki keinginan untuk mengembangkan anak-anak agar mendapatkan pendidikan internasional yang sebagian besar tidak dapat ditawarkan oleh sistem dari sekolah lokal, hal tersebut mendorong tren dan meningkatnya siswa lokal bersekolah di sekolah internasional. Pergeseran paradigma masyarakat terhadap sekolah internasional tersebut menjadi latar belakang munculnya permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan peran sekolah dalam mengembangkan dan membina kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang dibutuhkan oleh siswa. Permasalahan lainnya yang muncul di tengah pertumbuhan sekolah internasional di Indonesia terkait pelaksanaan pendidikan di sekolah internasional yang dikhawatirkan dapat berdampak pada perubahan substansif siswa lokal (WNI) dalam upaya pembangunan karakter bangsa (*nation character building*). Huges (2020, hlm 180) menyampaikan bahwa permasalahan terkait sekolah internasional bukan hanya masalah taksonomi melainkan pula masalah ideologi.

Di Indonesia sekolah internasional atau sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) semakin meningkat setiap tahunnya, berikut data tersebut:

**Tabel 1.1**

**Data Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) di Indonesia**

Tingkat	Tahun 2019	Tahun 2020
Sekolah Dasar	202	205*
Sekolah Menengah Pertama	177	176*
Sekolah Menengah Atas	122	128*
Jumlah	501	509*

Sumber: Data Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2021

Dibawah ini merupakan data sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) yang ada di Jawa Barat.

**Tabel 1.2**

**Data Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Jawa Barat**

Tingkat	Jawa Barat	Kota Bandung
Sekolah Dasar	27	8
Sekolah Menengah Pertama	26	8
Sekolah Menengah Atas	20	8

Sumber: Data Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2021

Berdasarkan data dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2022 jumlah siswa di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) di Indonesia sebanyak 98.625. Berdasarkan penelitian ISC (2017) melaporkan bahwa 80% dari siswa sekolah internasional adalah warga negara setempat (lokal). Hal ini menunjukkan bahwa sekolah internasional memiliki jumlah siswa lokal (WNI) yang meningkat dibandingkan siswa ekspatriat (WNA).

Berikut ini data sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung.

**Tabel 1.3**

**Data Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Kota Bandung**

Tingkat	Nama-Nama Sekolah
Sekolah Menengah Atas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMA <i>Bandung Independent School</i></li> <li>• SMA Bina Bangsa Bandung</li> <li>• SMA Mutiara Nusantara</li> <li>• SMA Kristen BPK Penabur Banda</li> <li>• SMA <i>Standford Bandung</i></li> <li>• SMA Pribadi Bandung</li> <li>• SMA <i>Nehru Memorial School</i></li> <li>• SMA <i>Temasek Independent School</i></li> </ul>

Sumber: Data Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2021

Peneliti menemukan keunikan dan permasalahan yang menarik di salah satu sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) yaitu *Bandung Independent School* (BIS) yang berkaitan dengan pembinaan kompetensi kewarganegaraan

(*civic competences*) terutama bagi siswa WNI yang dipandang oleh peneliti sebagai permasalahan dan fenomena yang kontemporer. Hal ini ditunjukkan dengan karakteristik yang dimiliki oleh sekolah diantaranya: (1) tujuan, visi-misi dan nilai-nilai yang dicapai berbasis internasional; (2) penggunaan kurikulum sekolah yang berstandar internasional; (3) bahasa Inggris/bahasa asing sebagai bahasa utama; dan (4) guru dan siswa berasal dari berbagai negara (multikultural). *Bandung Independent School* (BIS) memiliki perbedaan dengan sekolah nasional terutama terhadap persepsi terkait masalah filosofi yang mendasar. Hal ini dikarenakan *Bandung Independent School* (BIS) menggunakan kurikulum berbasis internasional yang lebih mengedepankan pada nilai-nilai universal berbeda dibandingkan kurikulum sekolah nasional yang menggali nilai-nilai karakter bangsa.

Perbedaan terkait pelaksanaan pendidikan di *Bandung Independent School* (BIS) memunculkan kesejangan (*gap*) yang signifikan dan berimplikasi pada siswa WNI terutama dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh warga negara terutama dalam pembangunan karakter bangsa (*nation character building*). Di *Bandung Independent School* (BIS) ditemukan adanya disparitas dan *disequilibrium* kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu Janmaat (2011, hlm. 455-482) bahwa ditemukan ketidaksetaraan yang relatif besar dalam kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) dikarenakan adanya komposisi kelas sosial dan etnis yang menimbulkan segregasi sosial dan komposisi kelas sosial.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi disparitas dan *disequilibrium* kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) siswa WNI di *Bandung Independent School* (BIS) dibandingkan siswa di sekolah nasional lainnya diantaranya: (1) latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi; (2) iklim kelas dan sistem pendidikan; dan (3) kebijakan sekolah yang berimplikasi pada kewarganegaraan dan identitas nasional. Kudrnáč dan Lyons (2017, hlm. 204-224) berpendapat bahwa iklim kelas berdampak pada kompetensi kewarganegaraan siswa. Kim dan Mobrand (2019, hlm. 1-14) menambahkan

bahwa kebijakan sekolah internasional berdampak pada kelangsungan sistem pendidikan nasional bagi siswa lokal.

Berdasarkan pemaparan diatas maka permasalahan dan keunikan di *Bandung Independent School* (BIS) menjadi salah satu topik menarik untuk dikembangkan oleh peneliti karena merupakan kebaruan suatu masalah secara *novelty* (mutakhir). Berbeda dari penelitian sebelumnya penelitian ini berfokus pada pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) yang belum diteliti oleh peneliti lainnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewarganegaraan republikan, pendidikan kewarganegaraan, *citizenship education continuum*, kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*), sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) dan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus di *Bandung Independent School* (BIS). Bertitik tolak dari permasalahan dan keunikan yang dijelaskan diatas serta fakta, data dan teori yang diuraikan peneliti menyajikan permasalahan tersebut ke dalam penelitian yang berjudul **“Pembinaan Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) Siswa Warga Negara Indonesia di *Bandung Independent School*”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Peneliti mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi terkait pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) siswa WNI di *Bandung Independent School*. Rumusan masalah penelitian secara khusus sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang dimiliki oleh siswa WNI di *Bandung Independent School*?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI di *Bandung Independent School*?
- 1.2.3 Apa saja kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang dikembangkan pada siswa WNI di *Bandung Independent School*?

1.2.4 Bagaimana kendala dan upaya dalam pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) siswa WNI di *Bandung Independent School*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah memperoleh gambaran mengenai pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI di *Bandung Independent School*. Tujuan penelitian ini secara spesifik dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.3.1. Mendeskripsikan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang dimiliki oleh siswa WNI di *Bandung Independent School*.
- 1.3.2 Menganalisis pelaksanaan pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI di *Bandung Independent School*.
- 1.3.3 Menjabarkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang dikembangkan pada siswa WNI di *Bandung Independent School*.
- 1.3.4 Menjelaskan kendala dan upaya dalam pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) siswa WNI di *Bandung Independent School*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai kontribusi pembelajaran PPKn di persekolahan dalam membekali kompetensi kewarganegaraan siswa sehingga dapat dijadikan rujukan (refensi) bagi pengembangan keilmuan pada Prodi PPKn secara ontologis, epistemologis dan aksiologis di masa mendatang khususnya dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman mendasar kepada siswa terkait peran dan tanggungjawabnya sebagai warga negara Indonesia dengan menumbuhkan kebanggaan dan rasa cinta pada identitas, jati diri dan moral bangsa. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek meliputi:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan, referensi dan wawasan terkait peran dan fungsi pelaksanaan pembelajaran PPKn dalam

pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI khususnya di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) baik dalam domain akademik, kokurikuler maupun sosial kultural, sehingga siswa memiliki wawasan terkait pengetahuan, keterampilan dan watak kewarganegaraan yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Melalui pembelajaran PPKn siswa dikembangkan untuk memiliki kompetensi kewarganegaraan yang menjadi sarana dan strategi dalam mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa yang ideal di masa depan khususnya di era digital.

#### **1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan**

Penelitian ini memberikan kontribusi dari segi kebijakan terkait strategi pembinaan kompetensi kewarganegaraan melalui pembelajaran PPKn dalam menghadapi tren global masyarakat di era digital, sehingga guru PPKn memiliki kemampuan dalam mendesain pembelajaran PPKn yang ideal bagi siswa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Pembelajaran PPKn dalam membina kompetensi kewarganegaraan siswa ditekankan pada pendidikan demokrasi, pendidikan nilai dan karakter, pendidikan hukum, pendidikan politik, dan pendidikan sosial budaya yang membekali siswa keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembinaan kompetensi kewarganegaraan pada siswa WNI melalui pembelajaran PPKn dapat diterapkan di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) yang menjadi ujung tombak untuk membentuk karakter siswa WNI sebagai warga negara Indonesia sehingga memiliki kecintaan dan kebanggaan terhadap identitas dan jati diri bangsanya. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah mengembangkan kebijakan terkait pembelajaran PPKn secara mendalam dan spesifik khususnya di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional serta menggali, mengelola dan membekali siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizens*) serta membentuk siswa yang memiliki karakter bangsa (*nation and character building*).



### 1.4.3 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

#### 1.4.3.1 Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan keilmuan peneliti untuk mengembangkan diri dan keprofesian sebagai seorang guru PPKn di masa mendatang terutama dalam merancang strategi pembinaan kompetensi kewarganegaraan yang menarik, inovatif, menyenangkan dan sesuai kebutuhan siswa sehingga pembelajaran PPKn dapat dijadikan rujukan dan digunakan oleh banyak orang untuk membina kompetensi kewarganegaraan siswa.

#### 1.4.3.2 Bagi Guru

Manfaat penelitian oleh guru dijadikan sebagai alternatif dalam melaksanakan pembinaan kompetensi kewarganegaraan melalui pembelajaran PPKn yang memiliki orientasi dan tujuan untuk mengembangkan dan mengeksplorasi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) serta watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang dibutuhkan oleh siswa dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai warga negara.

#### 1.4.3.3 Bagi Siswa

Manfaat penelitian bagi siswa adalah membekali dan memotivasi siswa dalam belajar PPKn dan mengimplementasikan kompetensi kewarganegaraan yang dimiliki dalam kehidupan berdemokrasi serta mendorong siswa untuk aktif dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### 1.4.3.4 Bagi Sekolah

Manfaat penelitian bagi sekolah dapat dijadikan referensi dan rujukan dalam mengembangkan kebijakan terutama dalam pelaksanaan pembinaan kompetensi kewarganegaraan melalui pembelajaran PPKn sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa melalui pengembangan kurikulum baik dalam aspek akademis, kokurikuler dan sosial budaya.

#### **1.4.4 Manfaat dalam Segi Isu dan Aksi Sosial**

Manfaat hasil penelitian dalam segi isu serta aksi sosial dapat disebarluaskan manfaatnya kepada berbagai pihak, diantaranya:

- 1.4.4.1 Bagi akademisi dan praktisi PPKn dapat menjadi pencerahan pemahaman untuk memotivasi mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan pembinaan kompetensi kewarganegaraan, selain itu mendorong proses pembelajaran PPKn yang menarik bagi siswa serta merupakan bagian dari solusi dalam menghadapi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan kompetensi kewarganegaraan melalui pembelajaran PPKn.
- 1.4.4.2 Bagi masyarakat manfaat penelitian ini menjadi tolak ukur dan refleksi untuk mendorong masyarakat ikut serta terlibat dan berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn dan mendorong semangat siswa dalam pelaksanaan pembinaan kompetensi kewarganegaraan.
- 1.4.4.3 Bagi orang tua manfaat penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman dasar kewarganegaraan yang ditanamkan sejak dini yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab siswa sebagai warga negara Indonesia.

#### **1.5 Struktur Organisasi Tesis**

Berikut struktur organisasi tesis dalam penelitian ini yang terdiri dari lima BAB sebagai berikut:

##### **1.5.1 Bab I Pendahuluan**

Dalam pendahuluan didalamnya membahas berbagai poin-poin penting berkaitan dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian secara teoritis, kebijakan dan praktis serta struktur organisasi tesis.

##### **1.5.2 Bab II Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka mengkaji teori dan materi yang relevan dengan masalah penelitian yang dikaji serta bertujuan mempermudah peneliti dalam menganalisis penelitian secara teoritis dan konseptual. Kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya teori kewarganegaraan

republikan, pendidikan kewarganegaraan, *citizenship education continuum*, kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*), sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian serta kerangka berpikir.

### **1.5.3 Bab III Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian membahas terkait pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, lokasi dan partisipan penelitian, langkah-langkah penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta pengujian keabsahan data.

### **1.5.4 Bab IV Temuan dan Pembahasan**

Dalam temuan dan pembahasan mencakup temuan penelitian yang terdiri dari gambaran umum obyek penelitian dan deskripsi temuan penelitian di lapangan. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan di lapangan yang diolah dan dibahas oleh peneliti dengan dikaitkan dengan teori dan konsep penelitian.

### **1.5.5 Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi**

Dalam simpulan, implikasi dan rekomendasi peneliti melakukan penarikan simpulan dari hasil penelitian serta implikasi penelitian, selanjutnya peneliti memberikan rekomendasi, masukan dan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan.